

Penguatan Hubungan Politik Internasional Indonesia dalam Mewujudkan Kedaulatan Poros Maritim yang Ideal

Chrystofer

ABSTRAK

Kedaulatan maritim menjadi salah satu isu yang semakin penting dalam perumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Perang global melawan illegal fishing, kerusakan laut, dan konservasi budidaya kekayaan hasil laut semakin memperoleh legitimasi dan dukungan yang luas dari dunia Internasional. Keterlibatan Indonesia dalam memperkuat kebijakan maritim tentu juga harus mengedepankan kerjasama secara hukum dan politik antar negara baik itu melalui hubungan bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama internasional ini harus dicermati oleh pemerintah, karena dalam pelaksanaannya akan diwarnai oleh berbagai kepentingan, baik itu dunia Internasional, pelaku bisnis, kelestarian laut dan perhatian terhadap nelayan lokal kita.

Menurut Data KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) pada tahun 2014, negara mengalami kerugian dari Illegal fishing mencapai 101 triliun rupiah per tahunnya, belum lagi ancaman kerusakan lingkungan dan keamanan wilayah kedaulatan laut Indonesia. Salah satu bentuk sikap Indonesia dalam menjaga potensi laut dan penegakan hukum adalah dengan penegakan aturan penenggelaman kapal asing ilegal yang memang telah tercantum secara jelas dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun, sikap tersebut dihadapkan pada tantangan besar, ketegangan antar negara seperti Malaysia dan Tiongkok pernah terjadi dengan protes keras yang dilayangkan kepada Indonesia. Strategi pemerintah untuk menghindari konflik berkepanjangan adalah dengan melakukan hubungan diplomasi politik terhadap negara-negara tersebut, sehingga komunikasi terus terjalin dalam mendukung perlawanan terhadap penanganan kedaulatan maritim Indonesia dalam realisme hubungan internasional.

Kata Kunci: Kedaulatan maritim, sikap Indonesia, hubungan diplomasi politik

Pendahuluan

Lautan dan samudra merupakan sumber daya tak terbatas yang dalam sejarah umat manusia telah digunakan sebagai sarana transportasi, sumber makanan,

rekreasi, pertambangan lepas pantai dan perdagangan laut serta menjadi media proyeksi kekuatan suatu negara. Lautan dan samudera di abad ke-21 di era globalisasi ini semakin penting ditandai dengan meningkatnya lalu

lintas perdagangan laut internasional yang didasarkan kepada gagasan keunggulan mutlak (*absolute advantage*) dari Adam Smith dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari David Ricardo. Perdagangan internasional melalui laut saat ini menjadi semakin penting dengan integrasi pasar dan kerjasama antar bangsa yang memungkinkan individu, perusahaan dan negara untuk menjangkau pasar di seluruh penjuru dunia dengan lebih cepat dan lebih murah.¹

Menurut WWF (World Wildlife Fund) bersama The Global Change Institute and The Boston Consulting Group pada tahun 2015, nilai aset kelautan dunia mencapai 24 triliun dollar AS yang terdiri dari potensi yang diambil langsung dari perikanan, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun sekitar 6,9 triliun dollar AS, transportasi laut 5,2 triliun dollar AS, penyerapan karbon 4,3 triliun dollar AS, dan jasa lainnya 7,8 triliun dollar AS. Hampir 2/3 produk kelautan tersebut tergantung pada laut yang sehat. Namun, menurut FAO, 90% stok perikanan dunia dalam kondisi menguatirkan, dengan data bahwa 61% sudah mengalami tangkap penuh (*fully exploited*) dan 29%

sisanya tangkap lebih (*over exploited*). Begitu pula tingkat kerusakan mangrove 3-5 kali dari laju deforestasi. Sekitar 29% padang lamun juga telah rusak. Begitu pula kerusakan terumbu karang dunia yang mencapai 50% dan pada tahun 2050 dengan kenaikan suhu seperti saat ini maka terumbu karang akan musnah.²

Biaya dari kerusakan kekayaan laut tersebut dirasakan secara tidak merata oleh para actor. Pada akhirnya tentu rakyat miskinlah yang paling dirugikan karena hidupnya sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh pengusaha perikanan bisa secara mudah mengalihkan wilayah tangkapnya, sementara nelayan kecil dengan modal yang terbatas yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika sumber daya ikanya habis, apalagi bahwa nelayan kecil tersebut tidak akan mampu mempengaruhi pasar dan kebijakan sehingga mereka terus akan menjadi korban dari kerusakan laut. Tentu nelayan kecil tidak mampu menghadapi tekanan kapal-kapal asing baik di wilayah Natuna maupun Arafura yang memiliki kekayaan laut besar. Hadirnya kapal-kapal asing tersebut merupakan kepentingan para pihak sehingga menjadi masalah ekonomi politik yang rumit dan

¹ Friedman, dalam Jurnal Wahyu Wardhana, *Poros Maritim: Dalam Kerangka Sejarah Maritim dan Ekonomi Pertahanan*, Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, hlm. 1.

² Arif Satria, 2015, *Politik Kelautan dan Perikanan, Catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY hingga Jokowi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 7.

memerlukan peran pemerintah dalam pemberantasan perikanan secara masif dan berkelanjutan.³

Sebagai sebuah negara kepulauan yang terpisah dengan lautnya, Indonesia juga dikenal dengan kekayaan laut yang melimpah. Poros Maritim Dunia pun muncul dan dikampanyekan sebagai kebijakan pemerintahan, dengan menjadikan sektor maritim sebagai panduan dan penentu, sekaligus tujuan pembangunan kabinet kerjanya. Dapat dikatakan, pencapaian sembilan agenda kerja pemerintahannya (*Nawacita*) terkait dengan implementasi pentingnya sektor maritim bagi RI, untuk mencapai tujuan negara, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.⁴

Pembangunan Maritim tidak bisa dilakukan secara serba instan. Untuk mengoptimalkan pembangunan maritim di tingkat lokal, nasional, dan global, dan khususnya dalam mencapai Poros Maritim Dunia dibutuhkan arah, orientasi, strategi, dan antisipasi pembangunan yang efektif. Segenap daya, upaya, keunggulan sumber daya, posisi

strategis, dan geopolitik perlu diarahkan untuk menjawab tantangan global dan mencapai keunggulan Indonesia dengan poros-poros sebagai berikut:⁵

1. Poros Konservasi dan Biodiversity berfokus untuk menjadikan Indonesia sebagai sumber daya terbesar dan lengkap keanekaragaman laut pesisir dan laut dunia, menjadi etalase maritim global, beserta berbagai manfaat dan fungsi ekonomi, sosial, dan ekologisnya. Komponen ini menjadikan Indonesia sebagai last resort dalam biodiversity, menjadi wilayah yang paling dijaga dan dilindungi oleh seluruh dunia. Termasuk di dalamnya menyediakan sumberdaya ikan, plasma nutfah, karbon, dan sebagainya.
2. Poros Industri maritim berfokus untuk membangun kepemimpinan dan praktek Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan segenap potensi sumberdayanya untuk berbagai industri dan jasa maritim dunia, yang memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar dan memberikan manfaat sosial yang luas. Komponen ini mencakup pengembangan industri perkapalan dan galangan kapal,

³ Ibid, hlm. 9.

⁴ Poltak Partogi Nainggolan, 2015, *Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm 169.

⁵ H. Abdul Kabir dan Fatkhul Muin, 2015, *Ikhtisar Dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Suatu Pendekatan yang Bersifat Holistik)*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 98.

pengembangan jasa-jasa kelautan, ekowisata bahari, industri farmasi dan obat-obatan yang kompetitif dan unggul sehingga menjadi kontributor signifikan bagi berbagai negara.

3. Poros Logistik Maritim berfokus menjadikan Indonesia sebagai penyedia fasilitas sistem logistik kemaritiman yang terbaik di dunia, sehingga bisa menjadi alternatif utama bagi berbagai lalu lintas barang, jasa, dan berbagai kegiatan kemaritiman di dunia. Komponen ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia, mendorong penyerapan tenaga kerja terampil, penyerapan teknologi kemaritiman terkini, dan memposisikan Indonesia sebagai negara maritim terpenting di dunia. Dalam lingkup nasional dan lokal, komponen ini akan mengurangi kesenjangan antara berbagai wilayah di Indonesia, mendorong standarisasi harga, pengelolaan pelabuhan, kapal, dan sebagainya.

4. Menjaga keutuhan, kedaulatan dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan.

Selama ini perhatian pemerintah di dalam penjagaan dan pengelolaan domain maritim dirasa masih kurang, khususnya berkaitan dengan keamanan jalur perdagangan dan jalur pelayaran. Kendati telah terdapat pemikiran mengenai Pendulum Nusantara yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia dalam suatu koridor ataupun program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ditujukan untuk pemeratakan pembangunan ekonomi ke kawasan timur Indonesia termasuk di dalamnya adalah sektor kelautan tampaknya visi poros maritim ini dapat menjadi harapan bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan lebih berkeadilan.⁶

Pembahasan

Indonesia sebagai negara besar tentu memiliki kedaulatan dalam peranan politik Internasional. Kedaulatan ini membuat Indonesia memiliki peran yang cukup kuat dalam percaturan politik internasional melalui pelaksanaan politik luar negeri “*Bebas Aktif*” tanpa memihak Blok Timur maupun Blok Barat.

⁶ Wahyu Wardhana, *Jurnal Poros Maritim: Dalam Kerangka Sejarah Maritim dan Ekonomi Pertahanan*, Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, hlm. 1

Dalam perkembangannya, politik luar negeri Indonesia telah melewati masa pertumbuhan yang cukup lama, tentunya hal tersebut tidak dilewati secara mudah. Peran pemerintah sebagai *stakeholders* Indonesia di luar negeri, serta diplomasi politik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan negara di berbagai forum internasional dalam membela kepentingan nasional (*national interest*). Kepentingan nasional ini menjadi tujuan dari politik perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri secara optimal dalam menghadapi tantangan global dalam sektor maritim.

Pada dasarnya, kebijakan politik luar negeri, merupakan perumusan hasil kebijakan dari perpaduan antara keadaan dalam negeri dan keadaan internasional. Perumusan kebijakan politik luar negeri, tentu saja akan mempertimbangkan faktor-faktor domestik dan keadaan internasional yang berkembang, agar kebijakan yang dirumuskan dapat mewujudkan kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa ada keterkaitan yang erat antara situasi dalam negeri dengan politik luar negeri. Pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo telah meluncurkan agenda pembangunan baru Indonesia, yang bertitik-tolak dari kebijakan

Poros Maritim (*maritime axis*) Dunia. Kebijakan ini mengungkapkan penekanan Indonesia pada pembangunan sektor kelautan di berbagai aspek dalam masa pemerintahannya dalam rentang waktu tahun 2015-2019.

Dari aspek praksis, politik luar negeri Indonesia harus mampu memperjuangkan permasalahan dan potensi yang ada di dalam negeri sebagai suatu kepentingan nasional di luar negeri. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan perbandingan wilayah perairan dan daratan adalah tiga berbanding satu (3:1) merupakan suatu realitas yang harus dapat dimanfaatkan dalam diplomasi dengan negara-negara lain. Kondisi tersebut pada satu sisi tentu sangat menguntungkan bagi Indonesia mengingat fungsi laut sebagai penyedia sumber daya alam serta kekayaan laut dan keanekaragaman hayati yang melimpah yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Dalam konteks pembangunan sektor maritim Indonesia, termasuk menjadi Poros maritim dunia, maka laut dan perairan Indonesia merupakan media penghubung antar pulau, dimana infrastruktur transportasi menjadi elemen penting yang

perlu dibangun untuk mendukung pembangunan sektor maritim.⁷

Salah satu gagasan Presiden Joko Widodo adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan negara dengan garis pantai sepanjang 99.093 km, terpanjang kedua di dunia setelah negara Kanada, sudah seharusnya potensi laut Indonesia dimanfaatkan untuk perkembangan dan kemajuan nasional. Sebelum cita-cita menjadi poros maritim dunia terealisasi dengan baik, peran Indonesia harus mampu teraktualisasi dengan baik melalui hubungan diplomasi politik terus-menerus secara baik agar tidak mereduksi kedaulatan wilayah maritim kita.⁸ Implementasi kebijakan Poros Maritim Dunia Pemerintahan Joko Widodo

mengundang sikap reaktif dari negara-negara di dalam dan luar kawasan Asia Tenggara. Joko Widodo Negara tetangga di dalam kawasan Asia Tenggara dan negara besar di luar kawasan ada yang memperlihatkan sikap yang tidak mendukung atau menentang apa yang dijalankan secara sepihak oleh Pemerintahan

Joko Widodo. Sikap ini tentu saja dapat mempengaruhi keharmonisan dan stabilitas keamanan yang selama ini dalam kondisi relatif kondusif di kawasan. Reaksi yang cenderung resisten, yang ditunjukkan secara terbuka, dan mengandung pesan pembalasan (aksi retaliasi) dapat mempengaruhi interaksi antar-negara di kawasan.

Kesimpulan

Kedaulatan maritim menjadi salah satu isu yang semakin penting dalam perumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Perang global melawan *illegal fishing*, kerusakan laut, dan konservasi budidaya kekayaan hasil laut semakin memperoleh legitimasi dan dukungan yang luas dari dunia Internasional. Upaya penegakan hukum dalam kedaulatan maritim ini menjadi kebijakan politik luar negeri dan menjadi panduan pemerintah dalam mewujudkan kepentingan nasional yang dilaksanakan melalui diplomasi politik atau dengan meningkatkan hubungan luar negeri dalam bentuk kerjasama bilateral, regional, dan multilateral.

Diplomasi atau hubungan politik internasional ini membuat posisi Indonesia

⁷ Adriana Elisabeth, 2016, *Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 14.

⁸ Claperyon, *Majalah Teknik Sipil dan Ilmiah Populer, Menggali Potensi Pesisir Negara Bahari*, Yogyakarta: Teknik sipil UGM.

memiliki peran strategis terhadap negara-negara lain, terutama kekuatan poros baru di bidang maritim yang mempengaruhi dinamika global. Posisi strategis Indonesia terutama dalam blok perdagangan dan regionalisme ekonomi baru serta merumuskan kebijakan kawasan untuk mencapai kedaulatan maritim yang ideal, serta konservasi sumber daya laut dan pertahanan keamanan negara yang baik.

Berbagai kebijakan strategis di bidang maritim ini juga memerlukan penataan fungsi kelembagaan yang baik, termasuk penguatan dan perbaikan koordinasi dan sinergi antar lembaga, terutama dalam internal kementerian harus ada koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan apabila terjadi resistensi akibat penegakan hukum laut Indonesia oleh negara-negara lain. Dengan

demikian, dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan kedaulatan maritim yang dilaksanakan melalui hubungan politik internasional ini juga harus sesuai dengan kepentingan nasional, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas politik dan keamanan. Perwujudan kedaulatan maritim yang ideal selayaknya menjadi acuan bagi penyusunan strategi ke depan. Indikator kedaulatan maritim yang ideal adalah tata kelola potensi maritim yang diolah secara maksimal dan memperhatikan aspek lingkungan keberlanjutan, Armada keamanan dan pertahanan laut yang semakin mapan, serta kemampuan hubungan diplomasi politik yang bertimbal-balik dan tidak merugikan.

Daftar Pustaka

- Claperyron. (n.d.). *Menggali Potensi Pesisir Negara Bahari*. Yogyakarta: Teknik Sipil UGM.
- Elisabeth, A. (2016). *Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kabir, H. A., & Muin, F. (2015). *Ikhtisar Dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan (Suatu Pendekatan yang Bersifat Holistik)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nainggolan, P. P. (2015). *Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Satria, A. (2015). *Politik Kelautan dan Perikanan, Catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY hingga Jokowi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wardhana, W. (n.d.). Poros Maritim: Dalam Kerangka Sejarah Maritim dan Ekonomi Pertahanan. *Universitas Pertahanan Indonesia*, 1.